

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Saiful, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: glora Madani Press, 2004).
- Asofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Atmodusirdjo, Prayudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Hakim, Lukman, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, (Malang: Setara Press, 2012).
- Huda, Ni'matul, Otonomi daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- \_\_\_\_\_, Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Murhaini, Suriansyah, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Pemerintah Kota Semarang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2014-2019 (Semarang: 2014).
- Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sabarno, Hari, Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).
- Soemitro, Ronny Haniatjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sunindhia, M, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).

### **PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- p. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- q. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- r. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- s. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- w. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
- cc. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- dd. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang.

## **WAWANCARA**

Arfiana K, S.Psi, MM., Kepala Subbid. Disiplin Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang, Senin 17 Desember 2018;

Da Costa, Marthen Stevanus, AP, MA, Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Semarang, Selasa 4 Desember 2018;

Tumari, SH., MM., Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kota Semarang, Senin 3 Desember 2018;

Widyatmoko, Hari, SH., Kepala Sie Hubungan antar Lembaga Satpol PP Kota Semarang, Kamis 22 November 2018.

### **JURNAL**

Akmal, Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, *Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1 Tahun 2006*.

Amri, Rizal Khairul, “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora”, *Jurnal skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, (Semarang: 2018)

Dharma Surya, Kontingensi Perilaku Birokrasi Pemda: Reviu Hasil Disertasi Almarhum DR. Kadjatmiko, M. Soc. Sc., *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1, 2010*.

Diamantina, Amalia, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. *Jurnal MMH Vol. 39 No. 1 Maret 2008*.

Haris Abdul, dan Heri Kusmanto, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 (1), Juni 2016.

Haydah, Titin Nur, Kendala dan Solusi dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah, Laporan Penelitian (Malang, 2012).

Ridlwan Zulkarnain, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.

### **SKRIPSI**

Putri, Dhita Asri Aryani, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, skripsi S-1 (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017).

### **INTERNET**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. “Jumlah Penduduk Kota Semarang”. 6 Desember 2018. <https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-06-04>.

Yunita, Niken Widya. Semarang Penyangga Utama Pertumbuhan Ekonomi Jateng. 14 Juni 2017. [detik.com](http://detik.com).